



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, dilaksanakan dengan konsep pengelolaan kota yang cerdas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menyusun *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang yang mengacu pada prioritas kebijakan Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
5. *Smart City* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
6. Suprastruktur adalah penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.
7. *Smart Governance* adalah pemerintahan cerdas yang memiliki sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
8. *Smart Branding* adalah inovasi peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
9. *Smart Economy* adalah upaya mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society.
10. *Smart Living* adalah upaya mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.
11. *Smart Society* adalah upaya dalam mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.
12. *Smart Environment* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar dengan tujuan mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, AZAZ, DAN KERANGKA PIKIR  
MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG

Pasal 2

Peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang.

Pasal 3

Tujuan Masterplan Smart City Kota Padang Panjang adalah :

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b. mengembangkan Padang Panjang Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
- c. menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untuk jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022; dan
- d. mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang berasaskan:
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. efisiensi;
  - d. inklusif; dan
  - e. partisipatif.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan Masterplan Smart City yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung untuk mendukung pencapaian tujuan Masterplan Smart City.
- (4) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan Masterplan Smart City yang tepat guna.
- (5) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan untuk mendukung pencapaian tujuan Masterplan Smart City.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya pelibatan seluruh stakeholder untuk mendukung pencapaian tujuan Masterplan Smart City.

Pasal 5

Dalam membangun kerangka pikir *Smart City* memiliki elemen utama yaitu :

- a. potensi alam (*nature*);
- b. struktur daerah (*structure*);
- c. infrastruktur (*infrastructure*);
- d. suprastruktur (*suprastructure*); dan
- e. budaya (*culture*).

## Pasal 6

Dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* adalah sebagai berikut :

- a. *Smart Governance*,
- b. *Smart Branding*,
- c. *Smart Economy*,
- d. *Smart Living*,
- e. *Smart Society*, dan
- f. *Smart Environment*.

## BAB III VISI PADANG PANJANG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

### Pasal 7

Visi Padang Panjang Kota Cerdas (Padang Panjang *Smart City*) adalah "Padang Panjang Cerdas dan Berintegritas".

- Cerdas : Menggambarkan Kota Padang Panjang sebagai Daerah yang mampu dan bisa memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
- Berintegritas : Menggambarkan Kota Padang Panjang sebagai daerah yang berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai, kode etik dan prinsip moral secara konsisten baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi :
  - a. masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 9

Kedudukan *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dan para pemangku kepentingan pembangunan kota dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dari berbagai pihak.

BAB V  
MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG

Pasal 10

- (1) *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta pentahapannya, dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan pengembangan potensi yang ada di Kota Padang Panjang sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup.
- (2) *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Juni 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN    PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : ~~37~~ 37 TAHUN 2019  
TENTANG MASTERPLAN SMART CITY  
KOTA PADANG PANJANG

**MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif cepat menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Smart City merupakan konsep kota cerdas di mana masyarakat bisa ikut serta dalam membantu pengelolaan sumber daya yang ada dan berpartisipasi dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat lainnya atau lembaga pemerintahan terkait sehingga informasi atau aduan tersebut dapat segera ditangani dan diantisipasi sebelum menjadi kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan.

Smart City merupakan isu besar yang saat ini berkembang di kota-kota besar di seluruh dunia. Dengan semakin padatnya jumlah penduduk, menjadikan pengelolaan kota-kota besar menjadi semakin kompleks dan dengan semakin terbatasnya sumber daya alam menuntut pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien. Belum ada definisi standar tentang apa yang disebut dengan kota cerdas (smart city), namun secara umum mengacu pada pengelolaan kota yang mendorong kualitas pengelolaan sumber daya alam dan penyediaan layanan sampai batas yang paling mungkin.

Konsep kota cerdas berjalan di atas hubungan transaksional antara warga dan penyedia layanan. Konsep ini mendorong peran yang lebih aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, misalnya dengan memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan, pelaksanaan pembangunan, serta dengan menjalankan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun konsep ini bukan tahap akhir, tapi akan terus berkembang dan berproses hingga kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali dan tangguh serta dapat merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.



Solusi yang cerdas melibatkan minimal 3 komponen, yakni Teknologi, Proses, dan Manusia. Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Solusi membutuhkan perubahan proses dalam beraktivitas sehari-hari, komponen manusia dibutuhkan karena sebagai penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survei tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia pada 2017. Dengan populasi penduduk Indonesia tercatat berjumlah 262 juta orang, terjadi peningkatan jumlah pengguna internet Indonesia menjadi 143,26 juta pada 2017 dengan penetrasi sebesar 54,69 persen dari populasi. Penggunaan internet di Indonesia mayoritas digunakan untuk keperluan media sosial. Hal lainnya yang paling banyak dilakukan masyarakat ketika mengakses internet adalah untuk mencari berita dan mendapatkan hiburan. Tiga kegiatan tersebut menurut survei, menjadi kegiatan utama yang diakses oleh 70,9 persen pengakses internet. Beberapa kegiatan lain yang juga menjadi jawaban masyarakat adalah mengakses internet untuk mengerjakan tugas, untuk mengakses email, mencari barang dan jasa, bertransaksi e-commerce, e-banking dan lainnya.

Konsep smart city yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Smart city Padang Panjang penting untuk diwujudkan agar Kota Padang Panjang tetap sustainable dan mampu bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Padang Panjang Smart City, implementasi e-government di Pemerintahan Kota Padang Panjang sudah menjadi keharusan. Sebagai langkah awal telah dirumuskan peraturan penggunaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang disusun dalam Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2018

Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Peraturan Walikota Nomor 18a tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejalan dengan program kerja Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia dari Kementerian Kominfo RI. Pada tahun 2017, Gerakan Menuju 100 Smart City memilih 25 Kabupaten/Kota untuk difasilitasi dan didampingi dalam menyusun Masterplan Smart City serta merencanakan dan melaksanakan program Quick Win Smart City. Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis smart city dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan direview setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.

### **Tujuan Masterplan**

Masterplan Smart City ini merupakan pedoman dan sebagai panduan bagi semua stakeholder khususnya untuk pemerintah daerah dalam penyusunan program untuk pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan daerah yang berdasarkan pada konsep smart city. Disusunnya masterplan smart city ini adalah untuk menangani permasalahan dan konsern utama yang muncul di Kota Padang Panjang, dimana secara umum tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan solusi inovatif dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan utama kota.
2. Memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Padang Panjang, serta.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang Panjang ke tingkat yang lebih baik.

### **Landasan Hukum**

Landasan hukum masterplan smart city Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

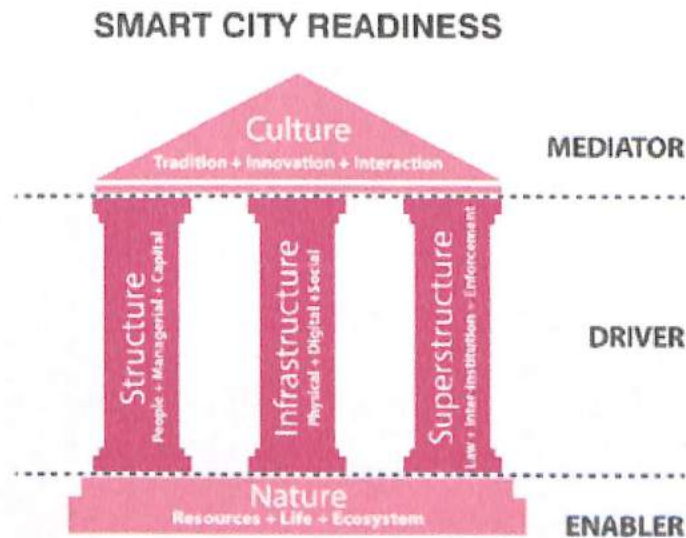
#### **Kerangka Pikir Smart City**

Dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/ kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

- **Struktur:** Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;

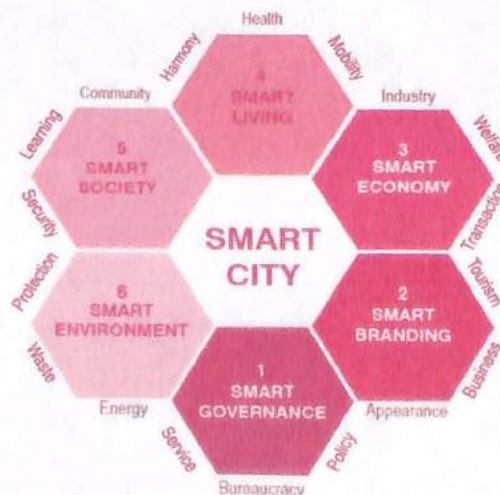
- **Infrastruktur:** pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur:** penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.

Gambar 1.1 Elemen *Smart City Readiness*



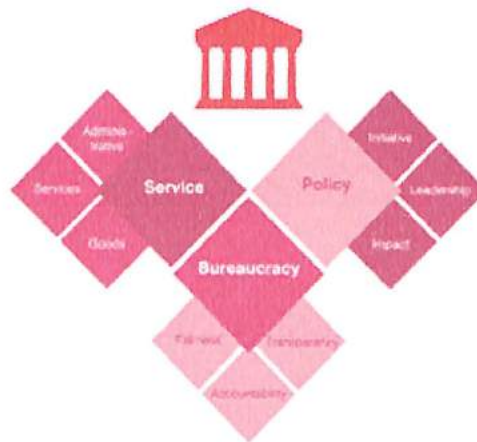
Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri. Terdapat enam dimensi Smart City (Gambar 1.2) yaitu dimensi (1) *Smart Governance*; (2) *Smart Branding*; (3) *Smart Economy*; (4) *Smart Living*; (5) *Smart Society*; (6) *Smart Environment*.



Gambar 1.2 Dimensi Smart City

## 1. SMART GOVERNANCE



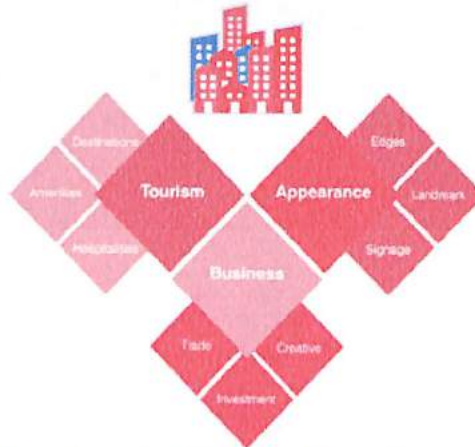
Gambar 1. 3 *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).



## 2. SMART BRANDING



Gambar 1.4 *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Tujuan dari Smart Branding adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari Smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

### 3. SMART ECONOMY

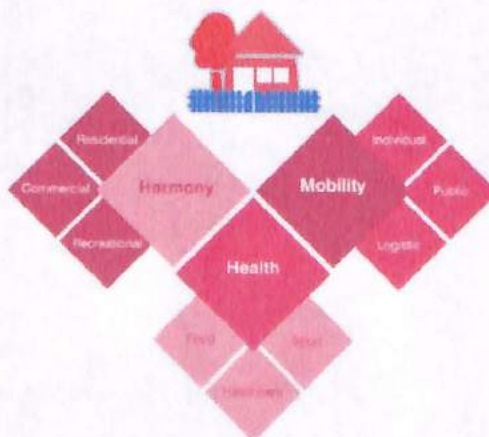


Gambar 1.5 *Smart Economy*

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah *Smart economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart economy* dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi *Smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *Smart economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

### 4. SMART LIVING



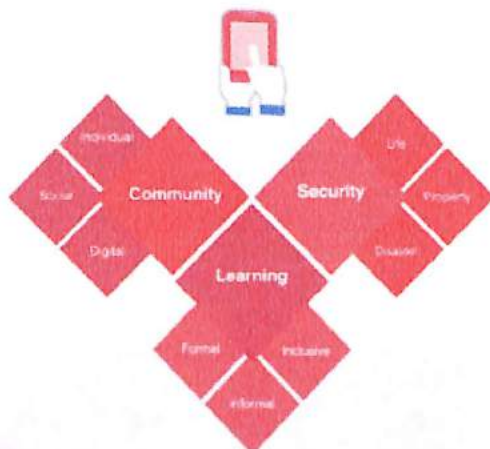
Gambar 1.6 *Smart Living*

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam smart city untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan



kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*. Sasaran dari smart living dalam smart city adalah mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.

## 5. SMART SOCIETY



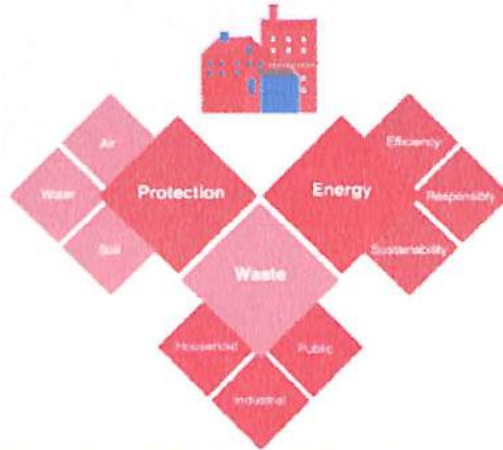
Gambar 1.7 *Smart Society*

*Smart society* sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *Smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).



## 6. SMART ENVIRONMENT



Gambar 1.8 *Smart Environment*

Dimensi ke enam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smartenvironment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran dari *Smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **VISI SMART CITY**

#### **Visi Smart City Kota Padang Panjang**

Pada RPJP Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2025 tepatnya pada RPJM Ke 3 (2018-2023) telah tertuang Arah Pembangunan Jangka Panjang untuk Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian tepatnya pada point C, yaitu Pengembangan IPTEKS (Ilmu pengetahuan, Teknologi dan seni) dan untuk pengembangan Teknologi Tinggi (High Tech) dalam kegiatan produksi. Hal ini sudah sangat tepat dijadikan dasar untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Cerdas. Tentunya hal tersebut perlu kemauan keras, keseriusan dan totalitas dari semua stakeholder dalam mewujudkan misi tersebut.

RPJMD Kota Padang Panjang 2018 - 2023 merupakan periode ketiga dari RPJP Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2025. RPJMD 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih 2018 adalah :

#### **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Padang Panjang sebagai kota maju dan unggul dalam pendidikan, perdagangan dan jasa yang ditopang oleh infrastruktur pembangunan yang memadai, dan birokrasi yang handal dengan tetap berwawasan islami, adat istiadat Minangkabau dan lingkungan.

Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif.

Ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut akan bisa diwujudkan melalui 6 (enam) pilar kota cerdas sehingga kesejahteraan masyarakat Kota

Padang Panjang dapat terwujud dengan cara yang cerdas. Konsep kota cerdas merupakan cara yang sangat efektif saat ini dalam mengatasi permasalahan berbagai sektor pada suatu daerah karena konsep kota cerdas mengatasi masalah dengan mengintegrasikan semua sektor tersebut seperti sektor pemerintahan, perekonomian, sosial, budaya, pertanian dan industri. Sektor sektor tersebut sudah terangkum pada 6 pilar kota cerdas sehingga penanganan permasalahan melalui konsep kota cerdas ini akan sangat mudah diatasi guna mewujudkan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Demi mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang tersebut di atas melalui keenam pilar Smart City, maka ditetapkan Visi Smart City Kota Padang Panjang:

#### **“PADANG PANJANG CERDAS DAN BERINTEGRITAS”**

- Cerdas** : Menggambarkan Kota Padang Panjang sebagai Daerah yang mampu dan bisa memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
- Berintegritas** : Menggambarkan Kota Padang Panjang sebagai Daerah yang berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai, kode etik dan prinsip moral secara konsisten baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

#### **Sasaran Padang Panjang Smart City**

Dari kerangka pikir smart city yang implementatif pada bab sebelumnya, yang menjadi sasaran dalam pembangunan smart city di Kota Padang Panjang sebagai upaya mewujudkan Padang Panjang Smart City adalah dengan mendefinisikan Padang Panjang Smart City sesuai dengan potensi yang telah dipetakan dalam Buku #1 Analisis Strategis Smart City Kota Padang Panjang ke dalam 6 (enam) dimensi, yaitu:

1. Smart Governance
2. Smart Branding
3. Smart Economy
4. Smart Living
5. Smart Society
6. Smart Environment

SMART GOVERNANCE	
Sasaran	Indikator Sasaran
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	% Inovasi yang berhasil diimplementasi kan untuk menunjang visi misi Kota Padang Panjang  Indeks kepuasan masyarakat  % Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi
Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  % Publikasi Kinerja Perangkat Daerah  % Masyarakat Yang Mengakses Website dan Media Sosial
Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	% Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan
SMART BRANDING	
Sasaran	Indikator Sasaran
Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah	% Peningkatan Investor  Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif  % Pelaku Seni Budaya yang Aktif
Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	% Pengembangan Kampung Kreatif
Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	% Tertatanya Landscape Kota

### SMART ECONOMY

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	% Peningkatan Pendapatan UMKM melalui Pemanfaatan TIK
Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	% Peningkatan Klasifikasi UMKM
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Produktifitas Ternak Sapi Perah

### SMART LIVING

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Layanan Kesehatan	% Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Web % Penggunaan Sistem Informasi RS
Terkendalinya Tata Ruang Kota Padang Panjang	Konsistensi Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	Berjalannya sistem Transportasi Terintegrasi berbasis Smart Card
Pengendalian angka kemiskinan	Angka Kemiskinan

### SMART SOCIETY

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan yang berkarakter	% Sekolah yang Menyelenggarakan e-Learning
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat % Peningkatan kualitas informasi publik
Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK
Meningkatnya Layanan Kebencanaan	% Penanganan bencana yang sesuai dengan waktu tanggap

SMART ENVIRONMENT	
Sasaran	Indikator Sasaran
Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	% penggunaan tenaga surya pada utilitas publik
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	% volume sampah yang masuk ke TPA Beroperasionalnya incinerator sampah di Kota Padang Panjang
Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan	Indeks Kualitas Udara dan Air Sungai

### BAB III

#### STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Untuk menuju Kota Padang Panjang sebagai Smart City perlu dilakukan analisa baik itu kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunity), dan tantangan (Threats) yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Hal tersebut dapat dilihat pada identifikasi berikut :

##### Identifikasi Kekuatan

1. Komitmen Semua Stakeholder dalam pengembangan *Smart city* Kota Padang Panjang.
2. Tingkat kesejahteraan ASN yang cukup baik dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat.
3. Tersedianya dukungan backbone jaringan dari berbagai provider penyedia layanan telekomunikasi.
4. Sudah tersebar beberapa spot Wifi gratis untuk masyarakat yang berlokasi di area fasilitas umum dan terus akan diperbanyak.
5. Posisi Kota Padang Panjang yang merupakan kota perlintasan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Luas daerah yang tidak terlalu besar memudahkan dalam mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai *Smart city*.
7. Tersedianya infrastruktur dasar yang cukup baik dalam mewujudkan Padang Panjang *Smart city* seperti jalan, fasilitas umum dan listrik.
8. Penerapan penggunaan sistem informasi dalam administrasi Pemerintahan di Kota Padang Panjang telah cukup lama dimulai.
9. Padang Panjang dikenal sebagai Kota Pendidikan yang memiliki banyak sekolah unggulan.
10. Terkenal sebagai kota kuliner yang menyediakan beragam menu dan telah dikenal sebagai kota tujuan pecinta makanan.
11. Memiliki kualitas lingkungan yang cukup baik sehingga berpotensi menjadi kota layak huni yang nyaman.
12. Memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan sebagai daerah tujuan pariwisata, penghasil produk pertanian.





### **Identifikasi Kelemahan**

1. Pemahaman dan pemanfaatan teknologi oleh aparaturn pemerintah dan masyarakat masih rendah.
2. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada.
3. Belum banyaknya sistem informasi intra pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi.
4. Belum tersedianya tempat yang representatif untuk pusat data dan pengelolaan teknologi informasi.
5. Belum terkoordinir dan terarahnya UKM dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pangsa pasar.
6. Layanan publik masih belum paripurna terutama di tingkat kelurahan.
7. Pengolahan sampah belum terkelola dengan paripurna.
8. Sistem perparkiran belum ditata dan terkelola dengan paripurna.
9. Layanan transportasi publik yang belum memadai.
10. Pengembangan pariwisata belum terarah.

### **Identifikasi Peluang**

1. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, akan mempermudah percepatan pengembangan infrastruktur kota.
2. Padang Panjang adalah kota tujuan pendidikan, budaya, kesehatan, dan wisata islami.
3. Banyak potensi sosial, kemasyarakatan, ekonomi serta sektor layanan publik yang bisa dikembangkan dengan inovasi teknologi.
4. Letak Kota Padang Panjang di jalur strategis, cocok untuk menjadi tempat promosi potensi daerah.
5. Terdapat banyak spot untuk pengembangan potensi pariwisata seperti wisata edukasi, wisata sejarah, wisata kesehatan dan kuliner.
6. Banyaknya potensi ekonomi berbasis masyarakat.

### **Identifikasi Tantangan**

1. Pertentangan kepentingan antara stakeholder dalam pengambilan kebijakan.
2. Dikotomi antara adat istiadat dengan perkembangan teknologi informasi.
3. Posisi kota padang panjang yang berada di area rawan bencana.
4. Semakin berkurangnya lahan hijau karena sudah banyak dijadikan perumahan dan area bisnis.

## Smart Governance

Smart Governance memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat secara cerdas. Saat ini masyarakat menuntut layanan yang maksimal terhadap pemerintah. Untuk itu pengelolaan pemerintahan secara cerdas merupakan hal mutlak yang harus disegerakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dan tentunya untuk melakukan perubahan dalam pelayanan publik, tentunya internal di pemerintah sendiri harus dibenahi terlebih dahulu dan birokrasi yang berjalan dikelola secara cerdas didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Inilah yang menjadi strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyiapkan Good Governance sehingga didapatkan pula pelayanan publik yang maksimal dan cerdas.

SMART GOVERNANCE		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Terselenggara-nya pelayanan publik yang berkualitas	% Inovasi yang berhasil diimplementasi kan untuk menunjang visi misi Kota Padang Panjang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</li><li>• Penerapan Zona integritas dalam area pelayanan publik;</li><li>• Peningkatan Implementasi teknologi dalam pelayanan publik;</li><li>• Mendata inovasi dari stakeholders;</li><li>• Mengembangkan inovasi melalui manajemen inovasi.</li></ul>
	Indeks kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;</li><li>• Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Ketata Laksanaan dan profesionalisme ASN.</li></ul>
	% Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengintegrasikan layanan publik berbasis online;</li><li>• Menata layanan berbasis web yang user friendly</li></ul>
Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan prasarana dan sarana e-government;</li><li>• Meningkatkan kualitas</li></ul>



		<p>tata kelola e-government</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menata dan menguatkan biokrasi dan kelembagaan termasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur</li><li>• Menata dan menguatkan biokrasi dan kelembagaan termasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur;</li><li>• Menata dan menguatkan ekosistem e-government</li></ul>
	% Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan kinerja pengawasan internal
	% Masyarakat Yang Mengakses Website dan Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kuantitas data dan informasi pada website Kota Padang Panjang</li><li>• Menjadikan website Kota Padang Panjang sebagai sumber rilis informasi kegiatan perangkat daerah</li></ul>
Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	% Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang

### Smart Branding

Branding suatu daerah tidak dapat lepas dari pariwisata, promosi dan wajah kota. Dengan adanya brand yang memiliki karakteristik yang kuat dan menggambarkan ciri khas suatu daerah, maka potensi daerah tersebut akan mudah dikenal khususnya untuk bidang pariwisata dan tentunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini akan lebih gampang untuk pengelolaannya. Dan ini akan berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan, namun harus diiringi juga dengan pengelolaan kepariwisataan yang optimal dan tetap memelihara kearifan budaya lokal sendiri yang selaras dengan nuansa islami yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Inilah yang menjadi dasar strategi

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengembangkan dimensi Smart Branding dalam mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Smart City.

SMART BRANDING		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah	% Peningkatan Investor	Panduan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah melalui Strategi Pemasaran di Era Digital.
	Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
	% Pelaku Seni Budaya yang Aktif	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pementasan seni.
Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	% Pengembangan Kampung Kreatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong masyarakat untuk kreatif di bidang ekonomi dan pariwisata;</li><li>• Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya yang dapat memberikan dampak perekonomian.</li></ul>
Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Ramah dan Berkualitas	% Tertatanya Landscape Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan infrastruktur kota yang layak, ramah, aman, dan nyaman bagi anak, orang muda, lansia, termasuk kaum difabel;</li><li>• Meningkatkan layanan akses internet bagi publik pada titik kumpul warga.</li></ul>

### Smart Economy

Smart economy pada dasarnya dibangun untuk menciptakan daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun di Kota Padang Panjang adalah daya saing UKM Kota Padang Panjang dengan penjual dari luar daerah. Dengan memanfaatkan TIK yang saat ini sedang berkembang pada sektor perdagangan yang dikenal dengan e-commerce. Berdasarkan dari perkembangan inilah Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan e-marketplace sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Smart City pada dimensi Smart Economy. Didukung dengan regulasi yang memudahkan

bagi UKM Kota Padang Panjang untuk berkembang dan meningkatkan pendapatannya.

Dengan telah siapnya pembangunan Pasar Pusat menjadi salah satu faktor yang dominan dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang dan dengan penerapan sistem non tunai (cashless) akan mendukung strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota smart economy.

Sektor pertambangan tidak bisa dilepaskan dari Kota Padang Panjang, karena sampai saat ini Industri Pengolahan Kapur Kota Padang Panjang masih dikenal luas oleh daerah luar, namun karena pengelolaan sektor pertambangan ini masih dikelola secara konvensional maka produksinya masih terbatas dan hal inilah peran serta Pemerintah Kota dalam pengembangan sektor pertambangan sebagai salah kontributor pada PDRB Kota Padang Panjang.

SMART ECONOMY		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	% Peningkatan Pendapatan UMKM melalui Pemanfaatan TIK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa, kaya menu, dan nyaman untuk dikunjungi;</li><li>• Mengembangkan sistem informasi untuk UMKM dan ekonomi kreatif.</li></ul>
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Produktifitas Ternak Sapi Perah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan jumlah diversifikasi produk dari susu;</li><li>• Meningkatkan nilai tambah yang didapat pengolah susu dari susu murni;</li><li>• Mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan produksi produk turunan susu khas Padang Panjang.</li></ul>
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Inkubator Bisnis;</li><li>• Peningkatan kualitas daya saing produk unggulan daerah;</li><li>• Pengembangan sentra produk ekonomi lokal;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat;</li> <li>• Meningkatkan klasifikasi usaha ke tingkat lebih tinggi.</li> <li>• Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan lapangan pekerjaan yang produktif;</li> </ul>
Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	% Peningkatan Klasifikasi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Gerakan urang mudo (generasi milenial) kreatif berwirausaha;</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;</li> <li>• Menciptakan persaingan yang sehat dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat.</li> </ul>

### Smart Living

Pengembangan hunian dan pola kehidupan cerdas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu saat ini Kota Padang Panjang perlu melakukan revisi RTRW agar tata kelola kota yang ideal dapat terwujud sesuai dengan peruntukan lahan. Dan kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas dalam penerapan strategi pada dimensi smart living. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan dan pengembangan fasilitas umum yang dilengkapi dengan TIK seperti tersedianya fasilitas parkir yang representatif akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

SMART LIVING		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Layanan Kesehatan	% Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Web	Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah terintegrasi
	% Penggunaan Sistem Informasi RS	Meningkatkan pemanfaatan SIMRS dan e-Puskesmas
Terkendalinya Tata	Konsistensi	Mengendalikan



Ruang Kota Padang Panjang	Pemanfaatan Ruang	pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	Berjalannya sistem Transportasi Terintegrasi berbasis Smart Card	Mengembangkan layanan jasa transportasi yang berkualitas dan terintegrasi
Pengendalian angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Melakukan koordinasi pengentasan kemiskinan

### Smart Society

Secara luas, smart society yang disatukan oleh teknologi digital melalui layanan pemerintah dan institusi swasta dapat mendorong perkembangan masyarakat menjadi yang lebih baik secara ekonomi dan membantu pemerintah dan institusi swasta mencapai efektivitas layanannya. Hal tersebut dapat tercapai jika terjadi perkembangan tiga arah, dimana literasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi berada dalam level yang sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan beberapa strategi dalam mewujudkan Padang Panjang pada dimensi smart society, seperti meningkatkan peran serta generasi muda untuk menggiatkan kembali kegiatan keagamaan dan adat istiadat. Pemerintah Kota Padang Panjang juga berusaha meningkatkan minat masyarakat terhadap literasi dengan menyediakan tempat baca yang dilengkapi dengan fasilitas TIK.

SMART SOCIETY		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan yang berkarakter	% Sekolah yang Menyelenggarakan e-Learning	Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya smart school, smart campus, smart pesantren
	Terwujudnya digital library	Membangun learning center sebagai pusat kegiatan pendidikan yang

		terintegrasi dengan digital library
	Terwujudnya pendidikan ramah bagi difabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pendukung sekolah dan ruang publik ramah disabilitas</li> <li>• Menyusun dan mengembangkan metode pengajaran yang lebih baik bagi sekolah bagi kaum difabel</li> </ul>
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan Smart Library, Warung Baca, Taman Baca Digital</li> <li>• Mengembangkan forum dan komunitas Literasi</li> </ul>
	% Peningkatan kualitas informasi publik	Membentuk komunitas Citizen Jurnalis untuk membantu penyerapan dan penyebaran informasi publik berbasis masyarakat.
Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK	Mengkampanyekan bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi dan hoaks, serta pemanfaatan internet untuk hal positif
Meningkatnya Layanan Kebencanaan	% Penanganan bencana yang sesuai dengan waktu tanggap	Meningkatkan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana

## Smart Environment

Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan menuntut strategi yang kuat dan mulai bergerak untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang setiap saat.

Sampah dan limbah menjadi permasalahan yang sangat krusial pada setiap ekosistem pemukiman. tingkat pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi tingkat produksi sampah, untuk itu diperlukan inovasi yang cerdas dalam pengolahannya sehingga sampah dan limbah dengan konsep daur ulang menjadi bermanfaat. Penggunaan teknologi dalam mengatasi permasalahan tersebut akan memudahkan dalam pengelolaannya, akan tetapi



tentunya hal tersebut juga diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

SMART ENVIRONMENT		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	% penggunaan tenaga surya pada utilitas publik	Mendorong penggunaan tenaga surya pada sarana umum
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	% volume sampah yang masuk ke TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R</li> <li>• Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R</li> <li>• Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan</li> </ul>
	Terwujudnya tata kelola sampah yang baik di Kota Padang Panjang	Menyusun kajian tentang pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang
Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan	Indeks Kualitas Udara dan Air Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan lingkungannya</li> <li>• Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan</li> </ul>

## BAB IV

### RENCANA AKSI SMART CITY PADANG PANJANG

Smart city merupakan langkah yang cerdas dalam mengatasi dinamika permasalahan yang semakin kompleks pada setiap daerah. Untuk itu diperlukan rencana aksi yang nyata dan memiliki tolak ukur yang jelas akan keberhasilan yang akan dicapai.

Dalam rencana aksi ini, ditetapkan breakdown dari berbagai goal atau tujuan utama yang bertujuan untuk menjawab problem statement, aktivitas, objektif, hingga tugas-tugas (tasks) atau eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi smart city dibagi dalam 4 (empat) Rencana, yaitu :

#### Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Daerah

Pembangunan dan pengembangan Kota Padang Panjang berwawasan smart city pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah dan sumber daya (manusia, alam, buatan, dan teknologi) secara optimal, efisien dan efektif. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city pada prinsipnya merupakan suatu bentuk daya dan upaya untuk:

1. Memberikan landasan, arah dan pedoman pelaksanaan pengembangan smart city;
2. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan smart city di Kota Padang Panjang;
3. Memberikan kemudahan bagi kegiatan-kegiatan pengembangan smart city;
4. Mendorong kegiatan smart city untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif;
5. Menjamin keberlangsungan program smart city yang tetap berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesiapan kebijakan dan peraturan terkait *Smart city* yang telah tersedia di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang, diantaranya:

1. Peraturan Daerah, saat ini Kota Padang Panjang bersama DPRD telah berhasil menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, saat ini telah pada tahapan harmonisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang.

3. Perwako 18 tahun 2018 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi.
4. Perwako 18a tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Perwako 11 Tahun 2010 Tentang e-Procurement.
6. Perwako 12 Tahun 2010 Tentang LPSE.
7. Perwako 16 tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.

Pada Perda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan di tetapkan memuat:

- a. Semua SKPD harus berkoordinasi dengan Diskominfo dalam memanfaatkan sarana prasarana TIK Pemerintah Kota Padang Panjang.
- b. Data, informasi, dan proses birokrasi dimiliki oleh OPD. Sedangkan Diskominfo berwenang untuk sarana prasarana TIK.
- c. Proses bisnis re-engineering yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotomatisasikan menjadi sistem informasi.
- d. Pengelola data yang berfungsi untuk melakukan: Akuisisi dan validasi data dasar, Kebijakan data / informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data melalui sistem informasi, Kebijakan pemanfaatan dan distribusi data, Pengamanan dan pemeliharaan data, Pengembangan sistem terintegrasi, Penetapan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi.
  - OPD berkoordinasi dengan tim teknis pengembangan sistem Diskominfo dalam hal:
    - Pengelolaan data
    - Keamanan
    - Proses bisnis (proses kerja sistem)
    - Metodologi
    - Platform (bahasa pemrograman, database engine, sistem aplikasi, dll)
    - Pelaksana
    - Kelayakan Anggaran
    - Pengelolaan sistem
    - Sarana dan prasarana sistem (Server, jaringan, PC terminal, dll)
    - Ketersediaan sistem di pasaran.
- e. OPD juga berkoordinasi dengan Diskominfo untuk mendapatkan ijin kelayakan tentang kebutuhan software proprietary dan aplikasi dari

- pemerintah pusat atau provinsi untuk dianalisa integrasi dengan sistem yang sudah ada.
- f. OPD pemilik data dan pemilik proses birokrasi juga berkoordinasi dengan OPD lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikan data / informasi / proses birokrasinya.
- g. Selanjutnya untuk pemanfaatan infrastruktur TIK, dimana semua OPD berkoordinasi dengan Diskominfo untuk hal – hal berikut:
- Kapasitas infrastruktur TIK yang dibutuhkan
  - Jumlah dan kualitas media komunikasi data
  - Tingkat keamanan
  - Sistem jaringan yang dibutuhkan
  - Kompatibilitas hardware dan software
  - Spesifikasi teknis kebutuhan pekerjaan
  - Mekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya.
- h. Semua OPD harus berkoordinasi dengan Diskominfo dalam melaksanakan pengadaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur TIK. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran, mencegah terjadinya tumpang tindih implementasi, dan yang terpenting adalah untuk pengendalian keamanan aset informasi Pemerintah Kota Padang Panjang. Namun jika sudah ada sistem yang dibangun dari pusat untuk kepentingan nasional, maka dengan koordinasi Diskominfo maka sistem diatur untuk mencegah masalah teknis operasional akses informasi yang mengganggu kinerja seluruh jaringan Pemerintah Kota Padang Panjang. OPD Diskominfo yang memiliki kewenangan kebijakan untuk pengamanan seluruh sistem.

### **Kelembagaan**

Melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Kota Padang Panjang telah mendirikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi dan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, sebagaimana tercantum pada uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016.

Dari segi kelembagaan, yang melingkupi personil, satuan organisasi, pembiayaan, dan peralatan, telah dilakukan upaya penguatan dengan jalan:

- Peningkatan status perangkat daerah pelaksana fungsi informasi dan komunikasi daerah, dari bentuk Kantor menjadi Dinas tipe dengan peluasan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.
- Telah dibentuk organisasi fungsional Dewan smart City Kota Padang Panjang yang dipimpin langsung oleh kepala daerah untuk fungsi yang menentukan kebijakan dan monev pengembangan smart City serta ditunjang oleh Tim Pelaksana Smart City.
- Semangat membangun sistem informasi di OPD sudah mulai berjalan dengan baik dan saat ini telah diakomodasi oleh Dinas Kominfo dengan membangun sistem terintegrasi melalui jaringan internal antar OPD. Hal ini dapat mengontrol semua aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Pelatihan teknis bagi Sumber Daya Manusia terus dilakukan dengan materi yang terkait dengan TIK seperti pelatihan jaringan, aplikasi dan multimedia. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian Aparatur Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang TIK.

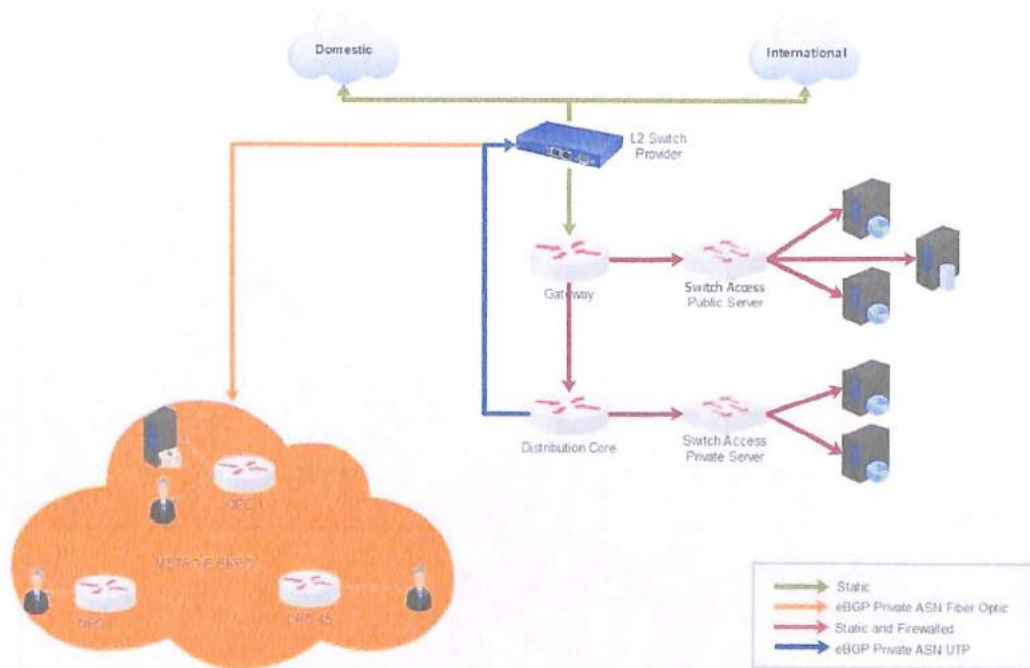
#### **Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City**

Memiliki infrastruktur yang memadai untuk penerapan Smart City merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi. Menurut Fanky Christian dari DPP Asosiasi Sistem Integrator dan Sekuriti Indonesia (Asisindo), pemerintah daerah setempat perlu menyediakan infrastruktur teknologi informasi sebagai langkah awal mewujudkan *smart city*. Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang dari Tahun 2017 sudah memulai membangun jaringan interkoneksi yang dinamakan Jaringan Metronet Padang Panjang, jaringan ini menggunakan teknologi serat optic yang mempunyai tingkat kecepatan yang lebih tinggi sehingga akan lebih leluasa dalam mengimplementasikan berbagai aplikasi sistem informasi di Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### **Jaringan Internet Pemerintahan**

Sejak akhir 2017 yang lalu Kota Padang Panjang dengan dukungan vendor telekomunikasi telah memulai menyelenggarakan pembangunan jaringan interkoneksi pemerintah yang disebut dengan Jaringan Metronet

Pemerintah Kota Padang Panjang. Jaringan ini menghubungkan 24 (dua puluh empat) OPD, 16 (enam belas kelurahan), 4 (empat) Puskesmas, 3 (tiga cabang kantor), dan 4 (empat) titik CCTV *Outdoor* yang digunakan sebagai media pemantauan dan pengawasan lokasi publik, seluruhnya terkoneksi melalui jaringan *fiber optic* milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan total *bandwidth* sebesar 150/150 Mbps *Dedicated Access*. Sementara akses jaringan intranet serta internet untuk seluruh ASN Pemerintah Kota Padang Panjang dikelola melalui *gateway user manager* dimana seluruh ASN memiliki akses yang sesuai *privilege* yang dimilikinya masing-masing.



Gambar 4.1 Topologi Jaringan Metronet Kota Padang Panjang

### Jaringan Internet Masyarakat

Pemerintah Kota pada tahun 2018 ini juga menyediakan 29 (dua puluh sembilan) titik wifi gratis untuk masyarakat, dimana lokasi penempatannya difokuskan pada titik kumpul masyarakat, objek wisata, sekolah, dan pasar. Untuk masing-masing titiknya disediakan *bandwidth* sebesar 20 hingga 60 Mbps *Broadband Access*. Saat ini akses yang disediakan secara gratis tersebut masih terbatas pada koneksi internet semata, namun dalam perencanaan kedepannya, jalur akses internet gratis ini akan lebih dioptimalkan lagi untuk kebutuhan komunikasi dua arah dari dan ke Pemerintah Kota dan masyarakat. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan penambahan fitur-fitur pendukung *smart city* pada layanan akses internet baik intra Pemerintah Kota maupun untuk masyarakat.

Lokasi Wifi.Id Kota Padang Panjang 2017-2018

NO	LOKASI	KOORDINAT
1	SMPN 3 Padang Panjang	-0.4735215,100.4221927,79
2	SMPN 4 Padang Panjang	-0.4635772,100.3790508,4247
3	SMAN 3 Padang Panjang	-0.4700145,100.3677051,6606
4	SMKN 1 Padang Panjang	-0.465895,100.4071838,766
5	SMKN 2 Padang Panjang	-0.4637999,100.4189606,788
6	SMK Cendana Padang Panjang	-0.4595,100.3968413,790
7	MAN 3 Padang Panjang	-0.4680379,100.3869073,790
8	Komplek Tahfiz El Idris	-0.465643,100.380865
9	Taman Mini	-0.4633421,100.3994376,790
10	Pasar Kuliner	-0.4629529,100.4008135,217
11	PDAM	-0.461694,100.3998748,17
12	Bioskop kuliner Karya	-0.4649488,100.3985155,19.32
13	PDIKM 1	-0.4700663,100.377062,17
14	PDIKM 2	-0.4724377,100.3736194,17
15	Senja Kenangan	-0.451862,100.3970273,17
16	Lubuk Mata Kucing	-0.455732,100.3949205,17
17	Pasar 1(Toko Emas)	-0.4640973,100.4005983,20
18	Pasar 2 (Gumarang)	-0.4640973,100.4005983,20
19	Pasar 3(Inpres)	-0.4640973,100.3997777,18
20	Gedung M. Syafei 1	-0.4640667,100.4012031,18.18
21	Lap. Khatib Sulaiman	-0.468165,100.3998727,16
22	Terminal Pasar Usang	-0.4639876,100.3972087,19.24
23	SMAN 1	-0.4563433,100.3971153,17
24	SMAN 2	-0.4552915,100.3990741,18.81
25	SMPN 1	-0.4780833,100.4098458,19.25
26	Taman Bermain Dinas Perpustakaan	-0.4780833,100.4098458,19.25
27	Kauman Muhammadiyah	-0.4780833,100.4098458,19.25
28	MTsN Padang Panjang	-0.4649488,100.3985155,19.32
29	Gedung M. Syafei 2	-0.4640667,100.4012031,18.18

### Pusat Kendali (Command Centre)

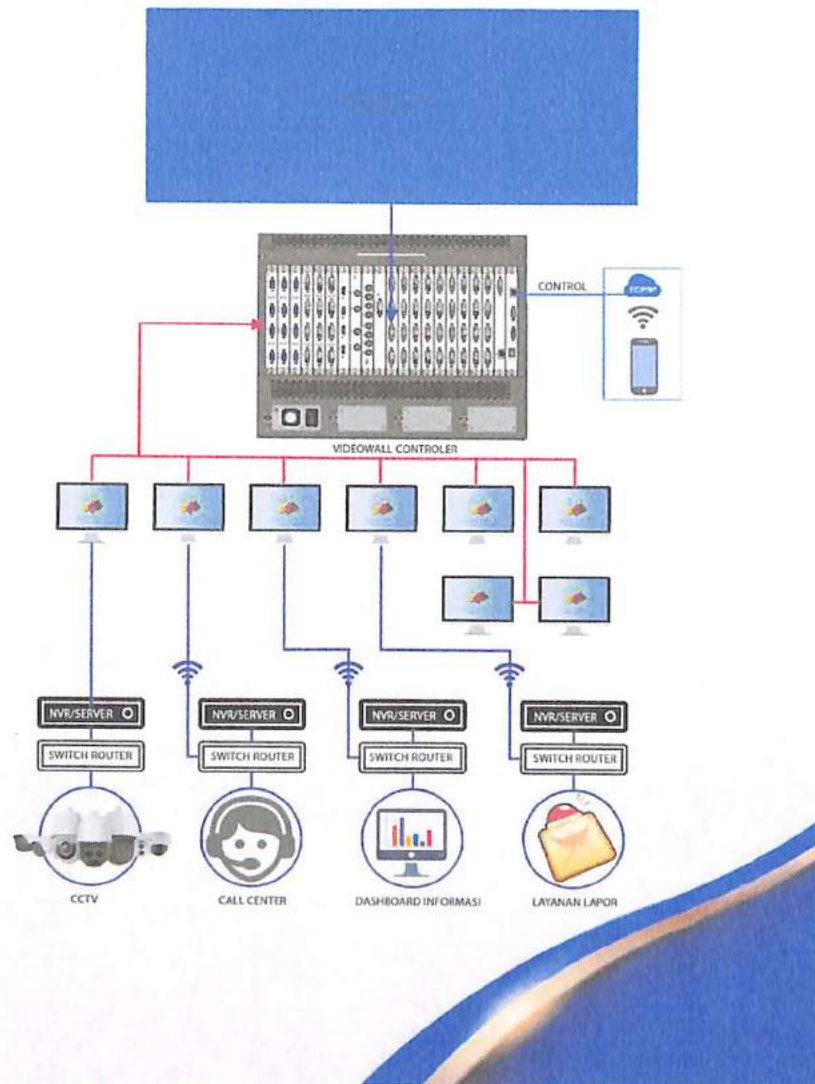
Infrastruktur pusat kendali jaringan dan data akan dibangun untuk memudahkan pemantauan kondisi operasional pusat data dan jaringan intra pemerintah untuk menjamin ketersediaan (*availability*) seluruh infrastruktur pendukung *Smart City*. Command Centre berfungsi untuk :

1. Memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat di seluruh wilayah kota untuk memanfaatkan layanan pemerintah.
2. Memungkinkan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi seperti *video surveillance*, stasiun monitoring cuaca dan iklim, monitoring kondisi lahan pertanian, hewan ternak, kondisi saluran irigasi dan lainnya (*Internet of Things*).
3. Mendorong munculnya inovasi pelayanan masyarakat di tingkat kota yang diprakarsai secara mandiri oleh pemerintah setempat dalam berbagai bentuk seperti implementasi Sistem Informasi, *public hotspot*, perpustakaan digital, taman digital dan lainnya.

Command Centre Kota Padang Panjang Direncanakan dibangun tahun 2019, Command Centre ini akan menjadi pusat kendali untuk seluruh infrastruktur security serta *surveillance*, seluruh data, sistem dan informasi dalam lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Command Center yang diproyeksikan akan menjadi pusat komando dan pusat kendali Decision Support System (DSS) yang mengendalikan seluruh sistem dan infrastruktur TI yang saat ini dimiliki oleh Kota Padang Panjang yaitu antara lain:

1. Monitoring CCTV Kota dan lalu lintas
2. Dashboard Sistem Informasi Kota Padang Panjang
3. Layanan Pengaduan Kota Padang Panjang





Gambar 4.2 Skema Command Centre Kota Padang Panjang

### Infrastruktur Pendukung Lainnya

Infrastruktur pendukung Smart City lainnya yang akan dibangun dan dikembangkan adalah diantaranya:

1. Penataan wajah atau teras kota melalui revitalisasi sarana publik seperti trotoar, taman-taman, pasar, sekolah-sekolah, sarana olah raga (sport center), ruang bermain ramah anak, lansia dan kaum difabel.
2. Penataan gedung-gedung Pemerintahan dengan mengedepankan konsep *iconic*.
3. Pembuatan dan distribusi Gerobak Wirausaha dengan konsep kreatif untuk kelompok usaha yang dalam pembinaan Pemerintah Kota.

### Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Kebutuhan perangkat lunak Smart City diturunkan dari strategi pembangunan Smart City pada BAB III. Tiap-tiap perangkat lunak Smart City pada bagian ini ada untuk mendukung pencapaian tujuan pada setiap elemen

Smart City yang telah diuraikan pada bab tersebut. Perangkat lunak tersebut dapat dilihat pada uraian masing-masing dimensi Smart City di bawah ini:

#### A. SMART GOVERNANCE

Sistem pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik:

1. Pol PP Singgalang (Singgah Lapau Singgalang)

Kegiatan penugasan anggota Satpol PP secara tetap di setiap kelurahan. Petugas akan bersosialisasi dan bersilaturahmi setiap hari dengan masyarakat kelurahan setempat yang bersifat non-formal, dapat terjadi di warung/lapau, rumah warga, pos ronda, dll. Petugas akan menanggapi dan menyelesaikan kasus pelanggaran Perda atau Trantibum pada tahap awal yang berdampak ringan dengan memberikan kesempatan pertama kepada *Niniak Mamak*, tokoh masyarakat, dan pihak kelurahan.

2. Sosialita (Sosialisasi Perda Berbasis Digital)

Sosialisasi Perda dilakukan semenarik mungkin dengan memanfaatkan media digital dengan konsep video animasi, infografis, motion grafis, film pendek, dan buku digital yang dapat disebarluaskan dengan mudah melalui videotron, website, dan sosial media.

3. PADUKO (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan Online)

Berawal dari keluhan masyarakat tentang panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam pengurusan dokumen kependudukan (mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan, Dinas CAPIL), maka timbul ide untuk membuat aplikasi online ini. Masyarakat hanya perlu upload dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi, lalu datang ke Dinas CAPIL untuk mengambil dokumen dan penyerahan berkas yang diupload untuk verifikasi.

4. Single Identity

Pemanfaatan NIK masyarakat dalam setiap layanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

5. SIM-PKB

Proses pendaftaran dan pembayaran uji kendaraan bermotor dilakukan secara online, sehingga menjamin layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Layanan di tempat dilengkapi dengan CCTV Autocapture untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar. Akurasi hasil pengukuran alat uji akan meminimalisir kesalahan input data.

6. Command Center

Membangun Pusat kendali seluruh layanan informasi IT Kota Padang Panjang. Command center ini direncanakan akan menggunakan salah satu ruangan di Balaikota. Item Command Center antara lain adalah sebagai berikut: 1. Video wall yang terdiri dari 9 unit monitor berukuran 52 inchi (2). Round table: yang merupakan tempat diskusi/pengambilan keputusan (decision support system), (3) Call center: mencakup seluruh layanan emergency seperti kedaruratan medis (jantung, kecelakaan), kebakaran, penanggulangan bencana, penanganan rabies, penanganan trantibum (4). Data Center: integrasi seluruh data yang ada di OPD (5). Sarana penunjang: cctv (13 unit), server (9 unit), fir wall. operator command center akan dioptimalkan melalui THL teknis Pemko Padang Panjang yang akan dilatih menggunakan aplikasi.

7. E-Litbang

8. KERAMAT (Klinik Restorasi Arsip Masyarakat)

Restorasi Arsip adalah suatu tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses merehabilitasi atau memperkuat kondisi fisik arsip/dokumen yang mengalami kerusakan (deteriorate) atau mengalami penurunan kualitas secara fisik.

9. LAKON (Layanan Kelurahan Online)

**Sistem pendukung efisiensi manajemen birokrasi**

1. Optimalisasi Portal Padang Panjang
2. KELUH (Klinik Konsultasi Layanan Utuh) Klinik KELUH adalah pemberian layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang kepada Mitra Kerja dengan upaya lebih tertib dan terarah yang meliputi layanan, waktu layanan, penempatan personil (gugus tugas), dan administrasi pelayanan konsultasi.
3. PITUAH Online (Pembinaan Inspektorat atas Temuan Hasil Pemeriksaan Online) Pituah Online merupakan media bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit.
4. E-SAKIP e-SAKIP bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD khususnya, dan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang umumnya.
5. Pengembangan Sistem Informasi E-Budgeting Terintegrasi dengan SIPD
6. SIMAK Sistem informasi yang memuat seluruh data kepegawaian secara digital yang terdiri dari biodata ASN, pengusulan tugas/ijin belajar, pernikahan/perceraian, diklat, kenaikan jabatan fungsional tertentu, KARIS/KARSU, cuti, kenaikan gaji berkala, Taspen.
7. Absensi Online
8. SiPenari Sistem Informasi Penilaian ASN Berprestasi. Melalui aplikasi ini diharapkan akan terpilih ASN yang akan menjadi ikon kesuksesan dalam pembinaan kepegawaian di kota Padang Panjang.
9. E-Baperjakat Sistem informasi pemetaan potensi aparatur serta sebagai alat bantu bagi pimpinan dalam penyusunan struktur perangkat daerah.

10. SPPD Online Surat Perintah Perjalanan Dinas harus dikontrol pelaksanaannya mulai dari surat undangan, surat tugas, pelaksana tugas, biaya yang dikeluarkan, kepentingan dalam melakukan perjalanan dinas, sampai pelaporan ke pimpinan.
11. PALITO (Pengelolaan Analisa Evaluasi Jabatan Online) Pengelolaan Analisa dan Evaluasi Jabatan berbasis Online. Palito dalam bahasa Minang berarti pelita, penerang dalam gelap, sumber cahaya. Aplikasi ini diharapkan menjadi pelita bagi ASN, petunjuk untuk mengetahui tugas dan fungsi jabatan agar terwujud kinerja optimal.
12. E-Office Pengurangan penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran. Segala bentuk surat menyurat dilakukan dalam sebuah aplikasi online, sehingga surat segera sampai ke tujuan, dan terdokumentasi dengan baik.
13. Agenda Kota Agenda kegiatan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang akan tercatat dan dapat terpublikasi sampai ke masyarakat, sehingga pimpinan daerah dan masyarakat dapat melihat jadwal kegiatan dengan pasti.
14. E-POKIR Sistem informasi yang menampung seluruh usulan anggota DPRD dari hasil aspirasi masyarakat.
15. E-Risalah Pencatatan risalah sidang DPRD dalam sebuah aplikasi online.
16. TAMBO Dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, birokrasi merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dalam mensosialisasikan kearsipan, sebagaimana amanat Undang-undang no 43 tahun 2009. Berinovasi dengan menciptakan sebuah tempat penataan arsip dengan nama TAMBO.

## B. SMART BRANDING

Sistem pendukung pada smart branding ini adalah:

1. Penataan Wajah Kota melalui penambahan instrumen TI pada infrastruktur atau fasilitas publik
2. Pengembangan Peta Investasi Daerah
3. Penataan Destinasi Wisata Kubu Gadang

Untuk optimalnya pemasaran silek lanyah yang sudah ada dilokasi tersebut selain diperlukan sewa tempat (sawah sebagai lokasi tetap silek lanyah) yang akan dilengkapi dengan fasilitas seperti jalan setapak, spot foto dan sebagainya yang sekaligus berfungsi untuk mengekspose keindahan persawahan di sekitarnya, termasuk penambahan bangunan iconic, juga akan dilengkapi dengan fasilitas akses internet gratis yang akan ditempatkan pada titik utama kawasan Kubu Gadang.

4. Festival Budaya Daerah

Festival seni kreasi ini selain akan menampilkan beberapa sub sektor ekonomi kreasi yang eksis di Kota Padang Panjang antara lain: fashion, kuliner, desain interior, fotografi, seni pertunjukan dan seni rupa, namun juga kedepannya akan mulai menyentuh bidang kreatif termasuk Teknologi Informasi dan film dan broadcasting.

## C. SMART ECONOMY

Pendukung dimensi smart economy:

1. Lapau UMKM

Lapau dalam istilah minangkabau adalah warung tempat berjualan. Konsep dari Lapau UMKM ini adalah sebuah media jual beli produk UMKM di Kota Padang Panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM melalui pemanfaatan TIK. Dalam Lapau UMKM ini para pelaku usaha didorong untuk memasarkan produknya lewat aplikasi e-commerce dan bertransaksi menggunakan sistem *cashless*.

2. Rumah Wirausaha

Pengelolaan Senja Kenangan Bukit Surungan merangkap sebagai rumah wirausaha. Integrasi Pengelolaan Senja Kenangan dengan Rumah Wira Usaha sebagai pusat kegiatan wirausaha (Pelayanan

Terpadu Satu Pintu UMKM). Rumah wirausaha merupakan wadah klinik UKM, pelatihan, packaging, fasilitasi izin terpadu. Klinik UKM berupa penyediaan Tenaga ahli berasal dari OPD terkait (Perdagangan, Pertanian, PMPTSP, DKK, Perbankan) dan kalangan akademisi (sebagai narasumber by topic/case) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi UKM. Untuk menarik minat pengunjung pada waktu-waktu tertentu diadakan pentas seni dengan memanfaatkan potensi seni local (bekerjasama dengan ISI dan Sanggar Seni). Disamping itu untuk membantu penyediaan modal usaha UKM dapat di fasilitasi melalui penyediaan kredit murah melalui UPTD Dana Bergulir. Pada lokasi ini juga tersedia workshop kulit dan Galery produk UKM Kota Padang Panjang.

#### **D.SMART LIVING**

Pendukung pada smart living yakni:

##### **1. PSC 119 (Public Safety Center)**

Call center merupakan unit layanan menggunakan nomor 119 dengan fitur yang terintegrasi dengan seluruh layanan reaksi cepat antara lain: kedaruratan medis (jantung, kecelakaan), kebakaran, penanggulangan bencana, penanganan rabies, penanganan trantibum. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini digunakan untuk: gaji tenaga medis, biaya jaringan 119 serta launching pembentukan Public Safety Center.

##### **2. Smart Hospital**

Smart Hospital adalah sebuah layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang mencakup pendaftaran online, pengambilan obat, medical record pasien, dan informasi Dokter yang tercakup dalam sebuah aplikasi mobile untuk mengurangi waktu antrian yang panjang.

##### **3. Ruang Bermain Ramah Anak**

##### **4. SIKESA (Sistem Informasi Keluarga Sejahtera)**

Penyediaan data dan informasi keluarga sebagai penunjang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

##### **5. Smart Card**

#### 6. Kajian Transportasi Layak

Kajian ini berisikan analisa tentang moda dan model pengelolaan transportasi umum di Kota Padang Panjang yang akan diintegrasikan dengan penggunaan Smart Card untuk pelajar dan mahasiswa.

#### 7. Smart Traffic Light

Smart Traffic Light mengatasi 3 problem, diantaranya mendeteksi kepadatan lalu lintas yang berpengaruh pada nyala lampu hijau menggunakan sensor objek infrared, mampu mendeteksi adanya sinyal khusus dari mobil-mobil istimewa seperti ambulance atau pemadam kebakaran atau polisi atau mobil semacamnya yang secara otomatis akan merubah nyala lampu traffic light merah menjadi hijau, serta mengusahakan lampu lalu lintas tetap menyala meski suply dari PLN padam dengan menggunakan baterai cadangan. Sistem ini mampu mengatur laju lalu lintas dengan mengatur jalan kendaraan secara bergantian yang melewati tempat tertentu setiap hari selama hampir 24 jam sehari dan pada alat ini perlu dipasangkan setiap harinya.

### E. SMART SOCIETY

Pendukung bagian ini yaitu:

#### 1. Klinik UN

Klinik UN diperuntukkan bagi siswa tingkat akhir yang akan menghadapi Ujian Nasional. Bentuk kegiatan ini berupa sharing one-on-one antara siswa dengan guru favoritnya. Setiap guru yang menerima kunjungan anak didik terbanyak akan diberikan penghargaan sebagai guru terfavorit, sedangkan bagi siswa akan diuntungkan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik.

#### 2. Smart EDU Padang Panjang



Padangpanjang Smart Edu adalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat Berbasis Web dan Aplikasi. Dirancang untuk untuk memudahkan para guru dan siswa menggunakan Teknologi Informasi 4.0 dalam pengelolaan proses belajar mengajar dan pengembangan diri. Memudahkan orang tua dan masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi untuk kemajuan pendidikan.

3. MASINTIK (Masyarakat Sadar dan Paham Informasi dan TIK)

Masyarakat Sadar dan Paham Informasi dan TIK. MASINTIK adalah relawan pengembang budaya informasi di kalangan masyarakat telah sadar dan paham akan pentingnya informasi dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. MASINTIK dibentuk untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat untuk mencapai tujuan strategis e-Government dengan membentuk forum Citizen Jurnalis untuk meningkatkan informasi publikasi yang berkualitas.

4. RINTIK

Sebuah wadah berkumpul bagi forum masyarakat sadar TIK untuk saling berbagi ilmu dan informasi terkini terkait perkembangan Smart City khususnya, dan teknologi terkini umumnya.

5. FGD Library

Minimnya wadah berdiskusi bagi kelompok masyarakat, organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya di Kota Padang panjang, maka Dinas Perpustakaan dan Kerasipan menyediakan sebuah fasilitas untuk berkumpul dan berdiskusi bagi komunitas-komunitas tersebut. Setiap pertemuan akan didampingi oleh fasilitator untuk menjaga keberlangsungan kegiatan tersebut.

6. Go-Book

Masyarakat Kota Padang Panjang masih banyak yang tidak mempunyai waktu luang untuk akses langsung ke perpustakaan, sehingga diperlukan sebuah aplikasi yang menghubungkan antara perpustakaan dengan masyarakat dengan bantuan Go-Jek.

7. Minangkabau e-book

Tingginya minat masyarakat membacakarya khasanah tokoh intelektual Minangkabau, maka dibuat sebuah aplikasi agar Koleksi karya khasanah tokoh intelektual Minangkabau dapat diakses lewat Aplikasi Android.

8. Kampung literasi

Perpustakaan kelurahan merupakan ujung tombak dalam mendekatkan buku dan bahan perpustakaan lainnya kepada masyarakat sebagai sarana pengembangan minat, memupuk bakat, kegemaran atau hoby, kemampuan, serta kebiasaan membaca dan menambah wawasan masyarakat pedesaan/kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjadi tujuan rekreasi edukasi bagi masyarakat. Sementara itu pada kenyataannya kondisi perpustakaan- perpustakaan yang ada di kelurahan-kelurahan di Kota Padang Panjang belum berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan.

9. Taman bacaan digital

Banyaknya pengunjung perpustakaan yang ingin mengakses internet membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan komputer untuk memudahkan pengunjung mengakses layanan digital, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menambah jumlah kunjungan ke perpustakaan.

10. Radio Online Perpustakaan

11. Cafe Literasi

Masyarakat Kota Padang Panjang apabila berkunjung ke warung tidak hanya sekedar makan atau minum tetapi juga duduk santai menghabiskan waktu, dan untuk mengisi kekosongan waktu tersebut diarahkan agar membaca buku untuk menambah wawasan dan peningkatan pengetahuan.

12. Festival Literasi

### 13. Learning Center

#### F. SMART ENVIRONMENT

Sistem pendukung dimensi Smart Environment diantaranya:

##### 1. Smart PUJR

Penerangan Jalan Umum dengan Pengendalian dan Monitoring Terpusat merupakan solusi cerdas berupa Lighting Automation and Controlling System pada fasilitas penerangan/pencahayaan yang mampu menghemat penggunaan energi dan biaya pemeliharaan 50-75% serta memudahkan pemeliharaan dan meningkatkan performansinya. Smart PUJR ini akan terintegrasi dengan command center untuk pengendalian dan kontrol.

##### 2. Go, Saronolah

Gotong Sarok Nan Lah Tapilah. Merupakan sistem penjemputan sampah terpilah dari bank-bank sampah di Instansi Pemerintahan dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

##### 3. Kajian Pengelolaan Sampah Terpadu

#### Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

Penguatan literasi smart city Kota Padang Panjang selain melalui portal Kota Padang Panjang *portal.padangpanjang.go.id* juga dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Bimbingan teknis, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar akan dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang terkait.

Semua pengembangan aplikasi dan layanan publik online memerlukan sosialisasi dan focus group discussion pada awal pengembangan, saat uji coba, dan saat implementasi. Selanjutnya dilakukan bimtek penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi. Bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang perkembangan teknologi, *troubleshooting* sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan

informasi. Untuk itu Dinas KOMINFO Kota Padang Panjang memastikan adanya dokumentasi seperti manual book, SOP, dan buku petunjuk.

BAB V

ROADMAP PEMBANGUNAN SMART CITY PADANG PANJANG

Fase Quick Win

NO	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur	CAPAIAN					Dimensi Smart City	OPD
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Pelayanan Dokumen Kependudu kan Online (PADUKO)	IKM	20	40	60	80	100	Good Governance	Disduk capil
2.	Penataan Desa Wisata Kubu Gadang	Kontrib usi Sektor Wisata untuk PDRB	20	40	60	80	100	Smart Branding	Dinas Pariwis ata

Nama Singkat Inovasi (Quick Win)	<b>PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online)</b>
Penjelasan Singkat	PADUKO adalah layanan kependudukan berbasis online dengan tools/ alat bantu sistem informasi berbasis web yang akan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dengan digunakannya sistem ini masyarakat akan sangat terbantu karena akan mengurangi frekwensi bolak balik ke Dinas Dukcapil, sebab masyarakat bisa mengakses dan menyampaikan data secara online.
Status saat ini	Saat ini, sistem PADUKO sudah dirilis dan ditetapkan sebagai program prioritas Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019. Adapun pada versi pertama ini, pengembangan sistem informasi PADUKO didasarkan pada Perpres 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Manfaat dari inovasi	Penerima manfaat inovasi ini adalah Masyarakat dan Pemerintah 1. Dengan diimplementasikannya sistem informasi PADUKO masyarakat mendapatkan banyak kemudahan

	<p>dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil, karena melalui sistem ini masyarakat bisa langsung menyampaikan data yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen secara online, sehingga akan menghemat biaya transportasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>2. Melalui sistem informasi ini Pemerintah bisa mengevaluasi dan menganalisa data kependudukan secara lebih real dan up to date.</p>
Keunikan/ kreativitas	<p>PADUKO dikembangkan dengan tujuan menjadi sistem informasi utama kependudukan Kota Padang Panjang, dimana seluruh layanan kependudukan dan catatan sipil Kota Padang Panjang nantinya akan terintegrasi secara sistem dan database melalui PADUKO, diharapkan hal ini akan ikut membantuk Kota Padang Panjang dalam upaya peningkatan integritas data menuju Satu Data Indonesia terutama untuk urusan kependudukan.</p>
Kemitraan	<p>Pihak lain yang berperan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Pengembangan Sistem Informasi</li> <li>2. Kecamatan: Sebagai unit terkait sekaitan surat-surat pengantar</li> <li>3. Kelurahan: Sebagai unit terkait sekaitan surat-surat pengantar</li> <li>4. Masyarakat : Pengguna langsung aplikasi</li> <li>5. Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas: Supporting untuk data kesehatan, kelahiran, kematian</li> </ol>
Potensi untuk pengembangan lebih lanjut, perluasan, replikasi	<p>PADUKO selain ditetapkan sebagai program prioritas pada Tahun Anggaran 2019 juga ditetapkan sebagai sistem informasi dan basis data utama pengelolaan kependudukan di internal Pemerintah Kota Padang Panjang.</p> <p>Untuk pengembangan kedepannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versi baru PADUKO saat ini telah disiapkan karena sekaitan dengan terbitnya Perpres 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terdapat perubahan</li> </ol>

	<p>mekanisme tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil.</p> <p>2. Dalam perencanaan pengembangan sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengintegrasikan PADUKO dengan sistem informasi lain dalam lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang, baik itu sistem informasi Kepegawaian, Perizinan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan lainnya.</p> <p>3. Tentang replikasi, Kota Padang Panjang semenjak 2017 yang lalu telah berkomitmen untuk kesediaan replikasi sistem dan aplikasi hasil pengembangan Kota Padang Panjang untuk daerah lain, hal ini sejalan dengan Memorandum of Understanding (MoU) Kota/ Kabupaten se Sumatera Barat bersama KPK pada Mei 2017 yang lalu. Dan, hal ini telah kami buktikan dengan memberikan replikasi aplikasi serta sharing pengetahuan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang kepada Kab/ Kota lain di Sumatera Barat dan juga dari luar Sumatera Barat.</p>
Strategi menjaga keberlangsungan	<p>1. Melalui forum koordinasi antar OPD dibawah arahan KDH dan Sekretaris Daerah</p> <p>2. Menetapkan PADUKO sebagai salah satu program prioritas kota</p>
Sumber daya yang digunakan	<p>1. SDM</p> <p>2. Infrastruktur TI</p>
Analisis Risiko	<p><b>Dampak</b></p> <p>Dampak utama dari penerapan sistem ini adalah berubahnya prosedur pengurusan dokumen kependudukan dari selama ini manual menjadi berbasis online, sehingga hal ini perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.</p>

	<p><b>Konsekuensi</b></p> <p>Peningkatan belanja sosialisasi pada OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</p> <p><b>Manajemen Risiko</b></p> <p>Salah satu resiko yang bisa terjadi adalah gagalnya sosialisasi dan pengenalan perubahan sistem kepada aparatur pelaksana sistem pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan atau masyarakat sebagai pengguna.</p> <p>Potensi ini harus diminimalisir melalui penyusunan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pembuatan dan penyebaran informasi mengenai perubahan sistem, serta penyiapan tim koordinasi implementasi sistem baru ini.</p>
--	--

Nama Singkat Inovasi (Quick Win)	<b>PENATAAN DESA WISATA KUBU GADANG</b>
Penjelasan Singkat	<p>Penataan kawasan Kubu Gadang sebagai desa tujuan wisata adalah kegiatan yang ditujukan mengangkat dan menaikkan nilai jual kawasan yang selama ini terkenal dengan potensi wisata tradisionalnya ke tingkat yang bernilai jual wisata lebih baik.</p> <p>Kegiatan ini dikerjakan bersama oleh banyak pihak, diantaranya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Padang Panjang, Komunitas Pemuda Pelopor, Komunitas Generasi Pariwisata (Genpi) Kota Padang Panjang, serta beberapa event organizer di Kota Padang Panjang yang didukung penuh oleh Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Maksud dari wisata digital disini adalah menjadikan objek wisata baru ini sebagai objek wisata yang siap dipublikasikan secara digital, artinya objek ini disamping harus memiliki ke khas-an, menarik dan menyenangkan untuk dikunjungi, juga harus menyediakan banyak objek yang secara visual menarik untuk di <i>shoot</i> dan dipublikasi melalui media-media sosial yang populer saat ini.</p>



	<p>Dalam kawasan ini bisa ditemukan kawasan perumahan khas minangkabau lengkap dengan landscape alam dan persawahan, pasar tradisional yang menjajakan kuliner-kuliner khas, kawasan atraksi olahraga tradisional, lengkap dengan objek instagramable yang juga populer saat ini.</p>
Status saat ini	<p>Saat ini Kawasan Wisata Kubu Gadang telah di launching oleh Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kementerian Pariwisata sebagai salah satu kawasan wisata baru dalam kerangka gerakan 1000 kawasan Wisata Digital.</p> <p>Dengan dilaksanakannya penataan kawasan wisata ini, saat ini Kota Padang Panjang telah memiliki objek wisata baru yang dijamin akan menjadi objek menarik bagi calon pengunjung di luar Kota Padang Panjang karena menawarkan nilai-nilai tradisional khas Kota Padang Panjang yang juga telah dilengkapi dengan wisata kontemporer yang populer saat ini.</p>
Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat inovasi ini adalah Masyarakat dan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kota Padang Panjang, dengan dilaunchingnya desa ini menjadi kawasan wisata menjadikan Kota Padang Panjang memiliki objek wisata baru yang dapat ditawarkan pada calon pengunjung dari berbagai daerah</li><li>2. Masyarakat sekitar kawasan yang menerima manfaat secara ekonomi secara langsung</li></ol>
Keunikan/kreativitas	<p>Kawasan Wisata Kubu Gadang menjual keseharian masyarakat yang masih hidup mengikuti adat istiadat, pola komunikasi sosial kemasyarakatan yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan tidak lupa kuliner khas dan pertunjukan khas desa Kubu Gadang.</p>
Kemitraan	<p>Pihak lain yang berperan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Komunikasi dan Informatika: terkait peningkatan infrastruktur IT.</li><li>2. Dinas Perpustakaan dan Arsip: terkait pemanfaatan</li></ol>

	<p>kawasan sebagai objek kunjungan dari forum-forum literasi.</p> <p>3. Gerakan pemuda pelopor: sebagai inisiator dan pengelola.</p> <p>4. Komunitas Generasi Pariwisata (GenPi): sebagai <i>promoter</i></p>
Potensi untuk pengembangan lebih lanjut, perluasan, replikasi	<p>Kawasan Wisata Kubu Gadang saat ini juga telah ditetapkan sebagai program prioritas pada Tahun Anggaran 2019.</p> <p>Untuk pengembangan kedepannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Tahun Anggaran 2019 akan dilakukan penataan dan pengembangan infrastruktur fisik penunjang pada Kawasan Wisata Kubu Gadang</li> <li>2. Pada tahun 2019 juga direncanakan akan dilakukan penambahan objek nomadic terutama untuk objek yang berkaitan dengan musim tanam padi akan disesuaikan dengan musimnya.</li> <li>3. Selanjutnya mulai tahun 2019 agenda kegiatan kawasan Kubu Gadang juga akan diintegrasikan kedalam kalender event Kota Padang Panjang</li> <li>1. Dan terakhir, salah satu rencana terpenting kedepan adalah menjadikan Kawasan Wisata Kubu Gadang sebagai kawasan utama perkampungan minang (Minangkabau Village) yang selama ini menjadi salah satu ikon Kota Padang Panjang</li> </ol>
Strategi menjaga keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui forum koordinasi antar OPD dibawah arahan KDH dan Sekretaris Daerah</li> <li>2. Menetapkan Kawasan Wisata Kubu Gadang sebagai salah satu program prioritas kota</li> </ol>
Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM aparatur</li> <li>2. Masyarakat setempat</li> <li>3. Kelompok sadar wisata, kepemudaan dan komunitas kepariwisataan.</li> <li>4. Infrastruktur TI</li> </ol>
Analisis Risiko	<p><b>Dampak</b></p> <p>Dampak utama dari diresmikan dan beroperasionalnya kawasan wisata ini adalah lahirnya objek wisata baru dari</p>

	<p>Kota Padang Panjang yang siap bersaing untuk menarik minat calon wisatawan dari kawasan Sumatera Barat hingga Provinsi sekitar, serta sekaligus peningkatan sumber pendapatan baru bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan wisata ini.</p> <p><b>Konsekuensi</b></p> <p>Perlunya dukungan program/ kegiatan dari berbagai sektor di Pemerintahan yang nantinya akan bisa makin meningkatkan nilai jual kawasan wisata ini.</p> <p><b>Manajemen Risiko</b></p> <p>Salah satu resiko yang bisa terjadi adalah gagalnya pengelola mempertahankan performa dan kreatifitas dalam menyajikan sajian-sajian baru di kawasan wisata.</p> <p>Potensi ini harus diminimalisir melalui dilaksanakannya pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kawasan, agar mereka selalu bisa terus meningkatkan performa di lapangan serta sanggup menawarkan kreasi-kreasi baru yang akan menarik minat para calon pengunjung.</p>
--	---

**Program Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang**

NO	Program/ Kegiatan	Quick Win 2018	Jangka Pendek 2019- 2020	Jangka Menengah 2019- 2023	Jangka Panjang 2019- 2028
I.	<b>SMART GOVERNANCE</b>				
1.	Pol PP Singgalang (Singgah Lapau Simpang)				
2.	Sosialita (Sosialisasi Perda Berbasis Digital)				
3.	Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO)				
4.	Single Identity				

5.	SIM-PKB				
6.	Command Center				
7.	Optimalisasi portal Padang Panjang				
8.	e-Litbang				
9.	KERAMAT (Klinik Restorasi Arsip Masyarakat)				
10.	KELUH (Klinik Konsultasi Layanan Utuh)				
11.	PITUAH Online				
12.	BUSI (Buku Konsultasi)				
13.	e-SAKIP				
14.	Pengembangan Sistem Informasi e-Budgeting Terintegrasi dengan SIPD				
15.	SIMAK				
16.	Absensi Online				
17.	e-Baperjakat				
18.	SPPD Online				
19.	PALITO (Pengelolaan Analisa Evaluasi Jabatan Online)				
20.	Agenda Kota				
21.	e-Office				
22.	e-POKIR				
23.	e-Risalah				

24.	Pengembangan Sistem Informasi e-Budgeting Terintegrasi dengan SIPD				
25.	LAKON (Layanan Kelurahan Online)				
II.	<b>SMART BRANDING</b>				
1.	Penataan Wajah Kota				
2.	Peta Investasi Daerah				
3.	Penataan Desa Wisata Kubu Gadang				
4.	Festival Susu				
5.	Festival Budaya Daerah (Barafest)				
III.	<b>SMART ECONOMY</b>				
1.	Lapau UMKM				
2.	Gerobak Wirausaha				
3.	Rumah Wirausaha				
4.	Pengolahan susu dan produk turunannya				
IV.	<b>SMART LIVING</b>				
1.	PSC 119 (Public Safety Center)				
2.	Smart Hospital				
3.	Taman Digital				
4.	SIKESA (Sistem Informasi Keluarga Sejahtera)				
5.	Kajian Transportasi Layak				
6.	Smart Traffic Light				



<b>V.</b>	<b>SMART SOCIETY</b>				
1.	Klinik UN				
2.	Smart EDU Padang Panjang				
3.	MASINTIK (Masyarakat Sadar dan Paham Informasi dan TIK)				
4.	RINTIK				
5.	FGD Library				
6.	Go-Book				
7.	Minangkabau e-book				
8.	Kampung literasi				
9.	Taman bacaan digital				
10.	Radio Online Perpustakaan				
11.	Cafe Literasi				
12.	Festival Literasi				
13.	Citizen Journalism				
<b>VI.</b>	<b>SMART ENVIRONMENT</b>				
1.	Smart PUJR				
2.	Go, Saronolah				
3.	Kajian Pengelolaan Sampah Terpadu				

## PENUTUP

Masterplan Smart City berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu komitmen semua stakeholder untuk menjalankan program dan kegiatan yang terdapat pada masterplan smart city Kota Padang Panjang ini.

Semoga Masterplan Smart City memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Lampiran

KERTAS KERJA RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG

No	OPD	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Program Kerja/Kegiatan Inovasi	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Tahun	Dimensi Smart City
1	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Klinik UN	% Sekolah yang Menyelenggarakan e-Learning	-	-	Orang tua, Pelajar	2018	Smart Society
			Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Smart EDU Padang Panjang	% Sekolah yang Menyelenggarakan e-Learning	-	-	Orang tua, Pelajar	2019	Smart Society
		Meningkatkan Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, handal dan unggul	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan yang berkarakter	Smart Card	Berjalannya sistem Transportasi Terintegrasi berbasis Smart Card	-	-	Dishub, Dinas Kominfo	2020	Smart Living

2	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Layanan Kesehatan	PSC 119 (Public Safety Center)	% Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Web	987.000.000	APBD	Dinas Kominfo	2019	Smart Living
3	RSUD	Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Smart Hospital	% Penggunaan Sistem Informasi RS	1.300.000.000	BLUD		2019-2023	Smart Living
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	Smart PUJR	% penggunaan tenaga surya pada utilitas publik		APBD	Dinas Kominfo	2020	Smart Environment
			Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	Penataan Wajah Kota	% Tertatanya Landscape Kota				2020	Smart Branding
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Tata Ruang Kota Padang Panjang	Ruang Bermain Ramah Anak	Konsistensi Pemanfaatan Ruang		APBD	Dinas Kominfo	2019	Smart Living

5	Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	Go, Saronolah	% volume sampah yang masuk ke TPA	-	-	Komunitas masyarakat, Forum Smart City, Gojek	2019	Smart Environment
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	Kajian Pengelolaan Sampah Terpadu	Berjalannya tata kelola sampah di Kota Padang Panjang	100.000.000	APBD			Smart Environment
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Pol PP Singgalang (Singgah Lapau Simpang)	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas	2019	Smart Governance
			Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	Sosialita (Sosialisasi Perda Berbasis Digital)	% Masyarakat Yang Mengakses Website dan Media Sosial	-	-	Dinas Kominfo	2019-2023	Smart Governance



7	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Pengendalian angka kemiskinan	SIKESA (Sistem Informasi Keluarga Sejahtera)	Angka Kemiskinan	-	-	Dinas Kominfo, Dasawisma	2019	Smart Living
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	PADUKO	% Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	-	-	RT, RW, Kelurahan, Kecamatan	2018	Smart Governance
			Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Single Identity	% Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	50.000.000	APBD, APBN	OPD	2022	Smart Governance
9	Dinas Perhubungan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	SIM-PKB	% Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	300.000.000	APBD	Bank Nagari, Dinas Kominfo	2019-2020	Smart Governance

			Terselanggaran ya pelayanan publik yang berkualitas	Kajian Transportasi Layak	Berjalannya sistem Transportasi Terintegrasi berbasis Smart Card	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	2019	Smart Living
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	MASINTIK (Masyarakat Sadar dan Paham Informasi dan TIK)	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK	-	-	Komunitas masyarakat, Forum Smart City	2019	Smart Society
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	RINTIK	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK	-	-	Komunitas masyarakat, Forum Smart City, Dinas Perpustakaan Kearsipan	2020	Smart Society
			Terselanggaran ya pelayanan publik yang berkualitas	Command Center	Indeks kepuasan masyarakat	5.000.000.000	APBD	Dinas Kominfo, Seluruh OPD	2019	Smart Governance
			Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Optimalisasi portal Padang Panjang	% Masyarakat Yang Mengakses Website dan Media Sosial	-	-		2019	Smart Governance

11	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Lapau UMKM	% Peningkatan Pendapatan UMKM melalui Pemanfaatan TIK	150.000.000	APBD	Kominfo, RKB, BRI, PT. Semen Padang	2019	Smart Economy
		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Sistem Informasi SEMBAKO	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	-	Dinas Kominfo	2020	Smart Economy
		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Rumah Wirausaha	% Peningkatan Klasifikasi UMKM	554.345.000	APBD	Rumah Kreatif BRI	2019	Smart Economy
		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Gerobak Wirausaha	% Peningkatan Klasifikasi UMKM	450.000.000	APBD	Pedagang Kaki Lima	2020	Smart Economy
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya a Ekonomi Kreatif Daerah	Peta Investasi Daerah	% Peningkatan Investor				2020	Smart Branding

13	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	e-Litbang	% Inovasi yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Padang Panjang			Seluruh OPD dan Masyarakat	2019	Smart Governance
			Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	e-Musrenbang	% Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan			Seluruh OPD dan Masyarakat	2019	Smart Governance
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	FGD Library	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	10.000.000	APBD	Komunitas masyarakat	2022	Smart Society
		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Go-Book	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	50.000.000	APBD	Gojek	2020	Smart Society
		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Minangkabau e-book	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat			Dinas Kominform, UNAND	2019	Smart Society
		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Kampung literasi	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	480.000.000	APBD	Kelurahan	2020-2023	Smart Society

		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Taman bacaan digital	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	-	DAK	Dinas Kominfo	2019	Smart Society
		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Radio Online Perpustakaan	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	125.000.000	APBD	Pihak Ketiga	2021	Smart Society
		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Cafe Literasi	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	-	-	Pedagang	2019	Smart Society
			Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas	TAMBO	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	Dinas Kominfo	2019	Smart Governance
		Peningkatan Kualitas SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Festival Literasi	% Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	100.000.000	APBD	Dinas Kominfo	2020	Smart Society
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas	KERAMAT (Klinik Restorasi Arsip Masyarakat)	Indeks kepuasan masyarakat	300.000.000	APBD	DPK SUMBAR Prov	2020-2023	Smart Governance

		Meningkatkan Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, handal dan unggul	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan yang berkarakter	Learning Center	Terwujudnya Digital Library	10.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	2023	Smart Society
15	Dinas Pariwisata	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	Penataan Destinasi Kubu Gadang	% Pengembangan Kampung Kreatif			Kelompok Sadar Wisata	2019	Smart Branding
			Berkembangnya Ekosistem Kreatif Daerah	Festival Budaya Daerah	% Pelaku Seni Budaya yang aktif					Smart Branding
16	Dinas Pangan dan Pertanian	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya Ekosistem Kreatif Daerah	Festival produk susu dan olahannya	Jumlah Event Ekonomi Kreatif			Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Forum Smart City, OPD	2019-2023	Smart Branding



			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pengolahan susu dan produk turunannya	Peningkatan Produktifitas Ternak Sapi Perah				2019-2023	Smart Economy
17	Inspektorat	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	KELUH (Klinik Konsultasi Layanan Utuh)	% Publikasi Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Kominfo, Seluruh OPD	2019-2028	Smart Governance
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	PITUAH Online	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Dinas Kominfo, Seluruh OPD	2019	Smart Governance
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	e-SAKIP	% Publikasi Kinerja Perangkat Daerah				2020	Smart Governance
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Pengembangan Sistem Informasi e-Budgeting Terintegrasi	Terintegrasinya Sistem Perencanaan dan Penganggaran			Dinas Kominfo, Seluruh OPD	2019	Smart Governance

		Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		dengan SIPD						
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	SIMAK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	Dinas Kominfo	2019	Smart Governance
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Absensi Online	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	Dinas Kominfo	2019	Smart Governance
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	e-Baperjakat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	Dinas Kominfo	2020	Smart Governance

		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	SPPD Online	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Dinas Kominfo	2019	Smart Governance
20	Sekretariat Daerah	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	PALITO (Pengelolaan Analisa Evaluasi Jabatan Online)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Dinas Kominfo	2019	Smart Governance
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	e-Office	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Dinas Kominfo	2019	Smart Governance
		Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Agenda Kota	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Dinas Kominfo	2019	Smart Governance

21	Sekretariat DPRD	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	e-POKIR	% Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Dinas Kominfo	2020	Smart Governance
			Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	e-Risalah	% Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Dinas Kominfo	2020	Smart Governance
22	Kecamatan	Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	LAKON (Layanan Kelurahan Online)	% Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	-	-	Dinsos, Disdukcapil, Diskominfo, KUA, RSUD, DPMPTSP, Polres	2019	Smart Governance

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI	KEMITRAAN	POTENSI
1	PADUKO	Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan online untuk memudahkan masyarakat dalam pengelolaan dokumen kependudukan.	Dinas Kominfo, RSUD, DKK	Dapat diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan lainnya, dan data dapat dimanfaatkan untuk pemetaan potensi masyarakat.
2	TAMBO	Dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, birokrasi merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dalam mensosialisasikan kearsipan, sebagaimana amanat Undang-undang no 43 tahun 2009. Berinovasi dengan menciptakan sebuah tempat penataan arsip dengan nama TAMBO.	Dinas Kominfo, Seluruh OPD	Pengurangan belanja kertas dan ruang untuk arsip fisik. Pengembangan aplikasi SIGADIS untuk arsip digital dinamis.
3	SIM-PKB	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendaftaran pengujian kendaraan dilakukan secara online, sedangkan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan sistem NCM Bank Nagari.	Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Nagari), Dinas Kominfo	Pengembangan SIM-PKB menjadi e-Dishub, dimana segala bentuk pendaftaran, pembayaran retribusi yang ada di Dinas Perhubungan dilakukan secara online.
4	SIKESA	Sistem Informasi Keluarga Sejahtera, untuk penyedia data informasi keluarga sebagai data penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Dinas Kominfo, Kelompok Dasawisma, Komunitas Masyarakat	
5	PALITO	Pengelolaan Analisa dan Evaluasi Jabatan berbasis Online. Palito dalam bahasa Minang berarti pelita, penerang dalam gelap, sumber cahaya. Aplikasi ini diharapkan menjadi pelita bagi ASN, petunjuk untuk mengetahui tugas dan fungsi jabatan agar terwujud kinerja optimal.	Dinas Kominfo, Seluruh OPD	

6	PITUAH ONLINE	Pembinaan Inspektorat atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dinas Kominfo, Seluruh OPD	Potensi pengembangan menjadi e-Audit, yaitu pemeriksaan inspektorat terhadap kegiatan berbasis online.
7	MASINTIK	Masyarakat Sadar dan Paham Informasi dan TIK. MASINTIK adalah relawan pengembang budaya informasi di kalangan masyarakat telah sadar dan paham akan pentingnya informasi dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. MASINTIK dibentuk untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat untuk mencapai tujuan strategis e-Government.	Dinas Kominfo, Relawan TIK, Forum Pegiat Literasi	Rumah Informasi TIK (RINTIK). Menyediakan sebuah forum diskusi dengan memberdayakan Citizen Jurnalis untuk saling berbagi ilmu dan meningkatkan kompetensi di bidang TIK.
8	Go, Saronolah	Go, Sarok Nan Lah Tapilah. Merupakan sistem penjemputan sampah terpilah dari bank-bank sampah di Instansi Pemerintahan	Bank sampah, Go-Jek, Seluruh OPD	
9	SIPENARI	Sistem Informasi Penilaian ASN Berprestasi. Melalui aplikasi ini diharapkan akan terpilih ASN yang akan menjadi ikon kesuksesan dalam pembinaan kepegawaian di kota Padang Panjang.	Seluruh ASN	
10	SMART EDU	Padangpanjang Smart Edu adalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat Berbasis Web dan Aplikasi. Dirancang untuk untuk memudahkan para guru dan siswa menggunakan Teknologi Informasi 4.0 dalam pengelolaan proses belajar mengajar dan pengembangan diri. Memudahkan orang tua dan masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi untuk kemajuan pendidikan.	Dinas Pendidikan	



11	SMART LIGHT	TRAFFIC	Smart Traffic Light mengatasi 3 problem, diantaranya mendeteksi kepadatan lalu lintas yang berpengaruh pada nyala lampu hijau menggunakan sensor objek infrared, mampu mendeteksi adanya sinyal khusus dari mobil-mobil istimewa seperti ambulance atau pemadam kebakaran atau polisi atau mobil semacamnya yang secara otomatis akan merubah nyala lampu traffic light merah menjadi hijau, serta mengusahakan lampu lalu lintas tetap menyala meski supply dari PLN padam dengan menggunakan baterai cadangan. Sistem ini mampu mengatur laju lalu lintas dengan mengatur jalan kendaraan secara bergantian yang melewati tempat tertentu setiap hari selama hampir 24 jam sehari dan pada alat ini perlu dipasangkan setiap harinya.	Dinas Kominfo	Potensi masa depan dari Smart Traffic Light ini akan diintegrasikan dengan Command Center menjadi Smart Traffic Management Systems.
----	----------------	---------	---	---------------	---

WALIKOTA PADANG PANJANG,

  
FADLY AMRAN